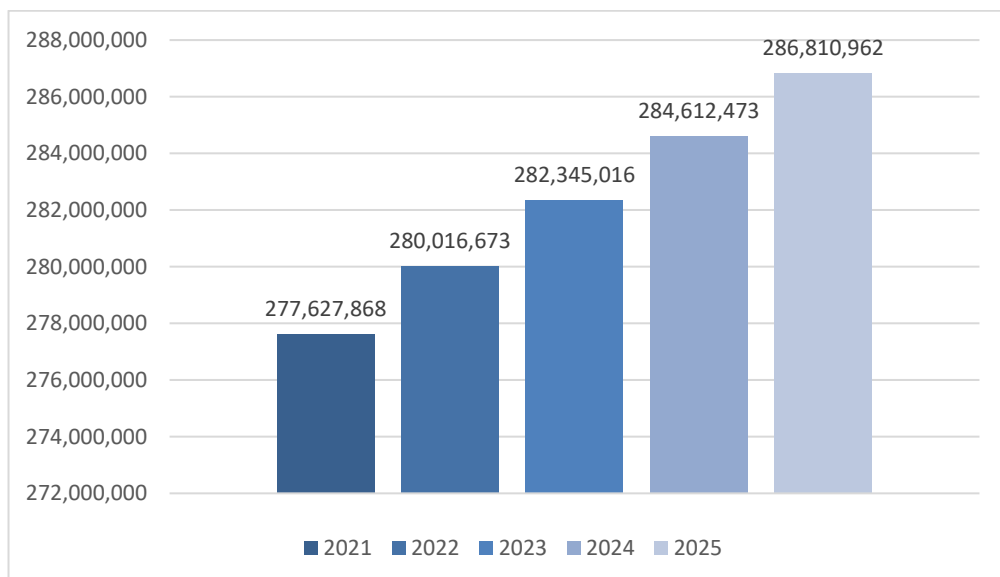


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatatkan bahwa Indonesia masuk ke dalam salah satu negara dengan jumlah penduduk negara terpadat keempat setelah Amerika Serikat (Yulin Esther Dita & Legowo, 2022). Berdasarkan data yang ada pada *World Population Review* (2025) sejak tahun 1980-2025, penduduk Indonesia secara berturut-turut terus meningkat dan berada pada posisi ke-empat sebagai negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia dengan total terakhir mencapai 286.810.962 jiwa dan tercatat sebagai negara dengan kategori miskin di Dunia urutan ke 73. Tentunya, peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali ini dapat menyebabkan berbagai dampak serius salah satunya yaitu kemiskinan.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Penduduk Indonesia Periode (2021-2025)

Sumber: *World Population Review*, 2025 (diolah tahun 2026)

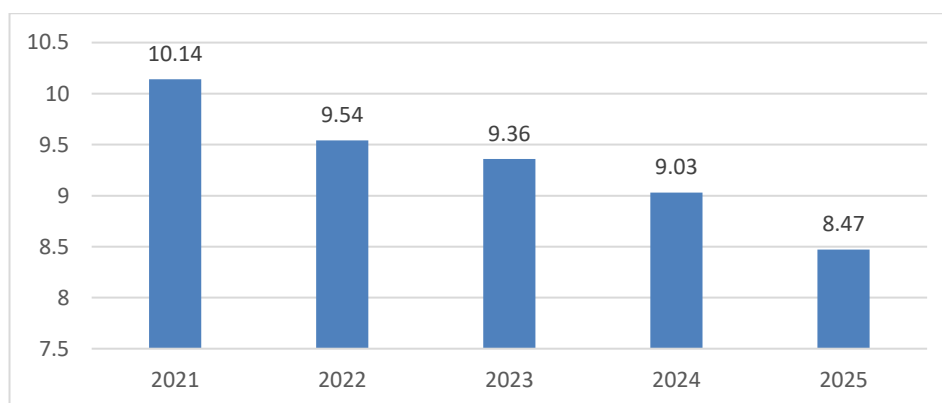
Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk yang cukup padat karena setiap tahunnya mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk dimana pada tahun 2025 mencapai 286.810.962 jiwa. Selain itu, Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk dengan rata-rata pertumbuhan penduduknya sebanyak 1,00% per tahun (Yulin Esther Dita & Legowo, 2022). Pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, secara umum laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menghambat upaya pengentasan untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk dapat menurunkan pendapatan per kapita, meningkatkan tekanan terhadap sumber daya yang tersedia, memperburuk ketimpangan sosial, dan menyulitkan penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan (Fitri et al., 2024). Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tak terkendali dapat menyebabkan tujuan pembangunan ekonomi tidak tercapai sehingga kesejahteraan rakyat semakin rendah yang pada akhirnya muncul masalah baru yaitu kemiskinan (Nur et al., 2022). Kemiskinan merupakan topik yang sering kali menjadi pembahasan negara-negara di dunia di mana setiap negara ingin warganya terbebas dari masalah kemiskinan (Sinurat, 2023). Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di antara negara-negara berkembang di ASEAN setelah Myanmar yang menduduki peringkat pertama sebagai negara termiskin (Tata Ihsan et al., 2025).

Kemiskinan menjadi salah satu penghambat sulitnya suatu daerah atau negara untuk maju. Lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk hal ini seperti Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan

untuk memenuhi standar kebutuhan hidup tertentu (Marbun & Suryahadi, 2009). Kemiskinan termasuk dalam skema pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang juga menjadi salah satu *goals* atau tujuan utamanya yaitu mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim di tahun 2030 (Zulyanto, 2022). Kemiskinan menurut Sudarwati (2009) dalam bukunya “*Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*”, menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, berupa sandang, pangan dan papan akibat keterbatasan dalam memperoleh akses guna memenuhi kebutuhan pokoknya dan melangsungkan kehidupan normalnya.

Kemiskinan tidak semata-mata terbatas pada kekurangan finansial dan pendapatan yang rendah, berbagai aspek lain turut berkontribusi dalam membentuk pengalaman ini. Faktor-faktor tersebut mencakup kondisi kesehatan yang buruk, akses pendidikan yang terbatas, diskriminasi dalam sistem hukum, peningkatan risiko terlibat dalam kegiatan kriminal, ketidakmampuan untuk melawan kekuasaan yang dominan, fluktuasi ekonomi yang tidak stabil, ketegangan sosial, serta kesulitan dalam mengelola kehidupan sehari-hari secara mandiri. Ketidakadilan distribusi sumber daya dan kesempatan, korupsi, serta kebijakan publik yang tidak efektif sering memperburuk keadaan. Selain itu, konflik, bencana alam, dan perubahan iklim memperburuk kondisi hidup masyarakat miskin (Tata Ihsan et al., 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan keberlanjutan tindakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini dimana juga menjadi salah satu tujuan utama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kemiskinan menurut Suryawati digolongkan dengan melihat bahwa kemiskinan sebagai bentuk multidimensional yang terdiri dari kemiskinan absolut yang disebabkan oleh pendapatan sekelompok orang yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar. Kemiskinan relatif yang terjadi akibat adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang berdampak pada belum terjangkaunya seluruh masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau standar kesejahteraan. Kemiskinan relatif yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara *modern*. Kemiskinan struktural yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan (Marsitadewi et al., 2024).



Gambar 1. 2 Persentase Kemiskinan di Indonesia (%) periode 2021-2025

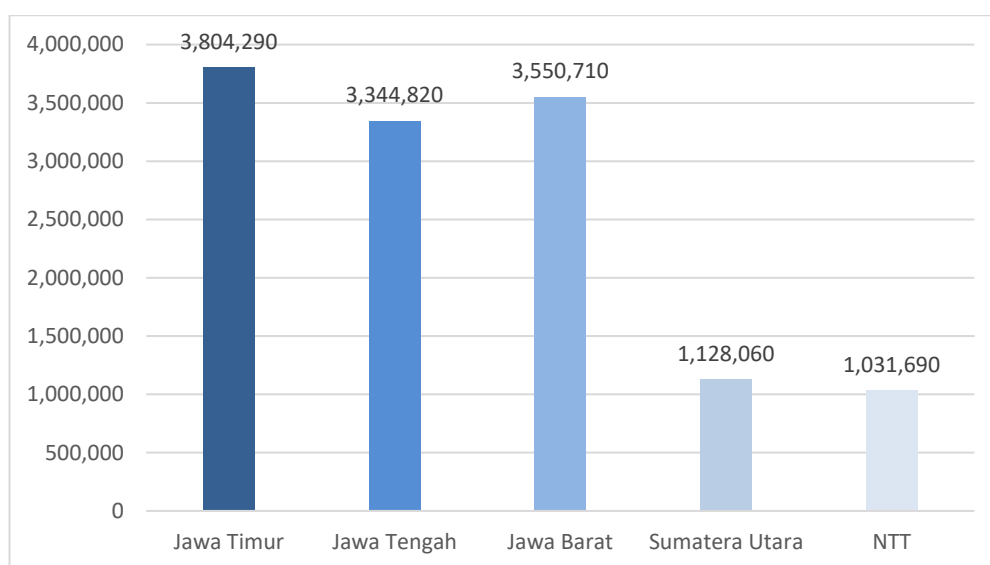
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025 (*diolah*)

Berdasarkan data pada diagram di atas yang dikeluarkan rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memang memperlihatkan bagaimana angka

kemiskinan nasional yang turun. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), persentase penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 8,47% atau sebesar 23,85 juta orang dari total populasi di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan nasional yang masih cukup tinggi, dimana target persentase angka kemiskinan dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dibahas oleh DPR RI Tahun 2024 menetapkan target kemiskinan sebesar 6,5%-7,5%. Selisih tersebut memperlihatkan bagaimana pengentasan permasalahan kemiskinan ini masih belum berjalan secara efektif (PA3KN, 2024).

Melihat pokok permasalahan tersebut, tentunya pemerintah Indonesia mengupayakan cara untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program baik di tingkat nasional maupun daerah yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Adapun beberapa program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun program padat karya telah diupayakan untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut (Friska Olabu et al., 2024). Tentunya beberapa upaya tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dimana masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut secara berkelanjutan dengan harapan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan mendorong perluasan perekonomian yang sehat (Agus Triono et al., 2023). Selain itu, butuhnya penekanan akan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif termasuk program bantuan sosial yang disesuaikan dengan kondisi lokal, untuk mengatasi

ketimpangan antar wilayah. Maka dari itu, pendekatan nasional perlu diperkuat melalui kolaborasi provinsi guna mencapai target pengentasan kemiskinan yang lebih merata dan berkelanjutan. Meski telah mengupayakan berbagai upaya pengentasan kemiskinan secara nasional, tingginya angka kemiskinan tersebut juga diikuti oleh beberapa provinsi yang angka penduduk miskinnya masih cukup tinggi (Badan Pusat Statistik, 2025).



Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia Tahun 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025 (*diolah*)

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Timur memiliki total penduduk mencapai 41,65 juta jiwa yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia pada tahun 2025 yaitu sebesar 3,8 juta jiwa (Dwi, 2024). Tentunya tingginya angka tersebut diharapkan dapat terus ditekan agar terus menurun, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (2025) mengemukakan bahwa kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur merupakan masalah yang tidak hanya berkaitan dengan

rendahnya pendapatan, namun juga berkaitan dengan permasalahan seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta kualitas pelayanan publik.

Provinsi Jawa Timur sendiri sebagai pemerintah daerah melakukan upaya pengentasan kemiskinan ini dengan merumuskan kebijakan melalui *Anti Poverty Program* (APP) sebagai pemberdayaan usaha ekonomi produktif yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan menjadi program baru, yaitu Program Peti Koin Bermantra yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2022. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan berupa alat produksi, pendampingan, serta pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi yang ada pada daerah tersebut yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Mekanisme pelaksanaan program ini dilakukan melalui usulan pemerintah kabupaten/kota yang diverifikasi di tingkat provinsi sehingga bantuan yang diberikan diharapkan tepat sasaran (Hamzahl et al., 2024). Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Wahid selaku PJ. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur saat acara peresmian program tersebut:

“Semoga melalui *The New APP* (Program Peti Koin Bermantra) ini menjadi sebuah bagian dari upaya luhur kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Jawa Timur menuju Optimis Jatim Bangkit”
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/610129/atasi-kemiskinan-di-jatim-program-peti-koin-bermantra-di-launching> (Diakses pada 10 Oktober 2025)

Program tersebut diharapkan dapat menjadi upaya pengentasan kemiskinan di lingkup Provinsi Jawa Timur, dimana pada data di lapangan masih menunjukkan tingginya angka kemiskinan yang ada pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

itu sendiri. Hal tersebut tentunya memperlihatkan bagaimana program yang dibuat masih belum mumpuni dalam mengentaskan kemiskinan. Adapun beberapa Kota/kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa timur, yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Tuban yang masing-masing mencatat angka di atas 14-20% berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2025

NO	KOTA/KABUPATEN	PERSENTASE (%)	PERINGKAT
1	Pacitan	12.97	7
2	Ponorogo	8.86	19
3	Trenggalek	10.29	14
4	Tulungagung	5.96	31
5	Blitar	7.57	26
6	Kediri	9.81	17
7	Malang	8.78	21
8	Lumajang	8.6	23
9	Jember	8.67	22
10	Banyuwangi	6.13	29
11	Bondowoso	12.2	9
12	Situbondo	11.17	12
13	Probolinggo	16.31	4
14	Pasuruan	8.21	25
15	Sidoarjo	4.4	34
16	Mojokerto	8.79	20
17	Jombang	8.36	24
18	Nganjuk	10.06	15
19	Madiun	10.4	13
20	Magetan	9.14	18
21	Ngawi	13.62	6
22	Bojonegoro	11.49	11
23	Tuban	14.13	5
24	Lamongan	12.03	10
25	Gresik	9.95	16

NO	KOTA/KABUPATEN	PERSENTASE (%)	PERINGKAT
26	Bangkalan	18.25	2
27	Sampang	20.61	1
28	Pamekasan	12.77	8
29	Sumenep	17.02	3
30	Kota Kediri	6.04	30
31	Kota Blitar	6.6	27
32	Kota Malang	3.85	36
33	Kota Probolinggo	5.69	32
34	Kota Pasuruan	6.18	28
35	Kota Mojokerto	5.05	33
36	Kota Madiun	3.89	35
37	Kota Surabaya	3.56	37
38	Kota Batu	2.86	38
39	Pacitan	12.97	7

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025 (*diolah tahun 2026*)

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang (2025), Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten sejak tahun 2021 dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur yaitu 20,61 % atau sebesar 213,98 ribu orang. Berdasarkan penjelasan yang ada pada Laporan Akhir Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang tahun 2024, permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sampang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang lambat, ketergantungan pada sektor informal, rendahnya kualitas pendidikan, dan keterampilan. Selain itu, temuan, serta peningkatan harga kebutuhan pokok. Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Mita selaku Koordinator Fungsi Sosial BPS Sampang kepada Radio Republik Indonesia:

“Terjadinya kenaikan penduduk miskin di Kota Bahari ini, naiknya harga kebutuhan pokok tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan pada beberapa penduduk juga karena turunnya produksi padi di bidang pertanian, sebab rata-rata penduduk miskin di Sampang bekerja di sektor pertanian.” (Umam, 2024) <https://rri.co.id/daerah/526395/faktor-meningkatnya-kemiskinan-di-sampang> (*Diakses pada 01 Oktober 2025*)

Struktur perekonomian Kabupaten Sampang pada tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28,76 persen. Dimana Suatu kota/kabupaten dianggap maju atau berhasil ketika terjadi transformasi struktural ekonomi dari sektor primer (pertanian dan perikanan) menuju dominasi sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) (Putri & Hisyam, 2014). Dominasi sektor industri dan jasa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan per kapita yang berkelanjutan. Ketika sektor-sektor yang lebih maju seperti industri dan jasa berkembang, cenderung menyebabkan bertambahnya kesempatan kerja, peningkatan produktivitas buruh, persediaan modal, serta semakin tingginya perbaikan dan penggunaan teknologi (Jabani et al., 2024).

Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) sendiri memiliki prinsip bahwa program yang dilaksanakan dapat berkesinambungan (*sustainability*) meskipun program tersebut telah berakhir. Selain itu, dapat menjangkau masyarakat miskin yang luas dimana penerima manfaat benar-benar masyarakat miskin. Program Peti Koin Bermantra ini merupakan bentuk kelanjutan dari *Anti Poverty Program* (APP) yang telah berjalan selama 17 tahun di 22 kabupaten di Jawa Timur. Program Peti Koin Bermantra bergerak di berbagai sektor seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, perindustrian, perdagangan, serta perkebunan setelah secara resmi *launching* pada Februari 2022.

Kabupaten Sampang sebagai kabupaten dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur juga termasuk ke dalam 22 Kabupaten yang

menjalankan Program Peti Koin Bermantra. Dimana Kabupaten Sampang telah bergabung sejak tahun 2005 yang saat itu masih bernama *Anti Poverty Program* (APP) sebelum akhirnya berlanjut pada tahun 2022 dimana telah berganti menjadi Program Peti Koin Bermantra. Kabupaten Sampang juga merupakan kabupaten pertama di Pulau Madura yang menjalankan Program Peti Koin Bermantra. Kabupaten Sampang sendiri belum menjalankan semua lini sektor yang ada pada Program Peti Koin Bermantra, dimana hanya 3 sektor yang telah dijalankan sejak peluncurannya dan beberapa sektor lainnya yang dalam proses pengajuan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur (2022). Adapun 3 sektor tersebut yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor kehutanan.

Tabel 1. 2 Kelompok Masyarakat Penerima Program Peti Koin Bermantra
Tahun 2022-2025

No	Kecamatan	Desa	Bidang	Pokmas
1	Omben	Rapalaok	Kehutanan	Tunas Karya
2	Kedungdung	Banjar	Pertanian	Mawar
3	Torjun	Torjun	Perikanan	Torjun Sejahtera
4	Omben	Sogian	Kehutanan	Matahari Sogiyen
5	Kedungdung	Gunung Eleh	Kehutanan	Wahana Wana Waskita
6	Omben	Jrangoan	Kehutanan	Amanah I
7	Camplong	Taddan	Kehutanan	Mekar Mulya
8	Sreseh	Labuhan	Perikanan	Makmur Sejahtera
9	Sampang	Paseyan	Pertanian	Anugrah Paseyan

No	Kecamatan	Desa	Bidang	Pokmas
10	Banyuates	Kembang Jeruk	Pertanian	Betoh Jaya
11	Karangpenang	Kesan	Pertanian	Gunung Laok
12	Omben	Madulang	Pertanian	Pangmasarang Jaya
13	Jrengik	Jungkaran	Perikanan	Fresh Clarias

Sumber: Data Internal Bappeda Kabupaten Sampang, 2025 (*diolah tahun 2026*)

Berdasarkan data pada tabel yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Sampang, menunjukkan bahwa Program Peti Koin Bermantra telah menjangkau sekitar 13 kelompok masyarakat penerima yang tersebar pada sektor perikanan, kehutanan, dan pertanian dalam periode. Setiap kelompok masyarakat dalam program ini terdiri dari 10 orang anggota. Pada sektor perikanan, terdapat tiga kelompok yang menerima program secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2025, yang menunjukkan adanya kesinambungan dukungan pada sektor ekonomi pesisir. Sektor kehutanan menjadi sektor dengan jumlah kelompok penerima terbanyak yaitu lima kelompok yang sebagian besar menerima bantuan pada tahun 2025. Sementara itu, sektor pertanian diwakili oleh dua kelompok yang menerima program pada periode yang sama. Setiap tahunnya kelompok penerima bantuan akan terus berganti untuk menjangkau masyarakat miskin yang lain. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan antar sektor, seperti sektor perikanan dan sektor kehutanan yang lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Hal tersebut dikarenakan bantuan yang diperoleh tidak dapat maksimal dikelola akibat dari musim ataupun cuaca yang tidak dapat diprediksi, sehingga tanaman yang dikelola seperti tembakau dan jahe menjadi gagal panen.

Tabel 1.3 Pendapatan Kelompok Masyarakat Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Program Peti Koin Bermantra Tahun 2022-2024

No	Kelompok Masyarakat	Sektor	Sebelum	Sesudah
1	Sumber Berkah	Perikanan	Rp1.000.000	Rp46.991.000
2	Torjun Sejahtera	Perikanan	Rp12.000.000	Rp42.438.000
3	Makmur Sejahtera	Perikanan	Rp1.300.000	Rp13.838.000
4	Amanah I	Kehutanan	Rp2.000.000	Rp8.250.000
5	Mekar Mulya	Kehutanan	Rp1.000.000	Rp4.841.000
6	Mawar	Pertanian	Rp150.000	Rp6.500.000
7	Anugrah Paseyan	Pertanian	Rp5.000.000	Rp15.000.000

Sumber: Data Internal Bappeda Kabupaten Sampang, 2025 (*diolah tahun 2026*)

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat adanya peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat penerima Program Peti Koin Bermantra setelah pelaksanaan program pada tahun 2022-2025. Pendapatan tersebut merupakan akumulasi pendapatan selama bantuan program. Dimana nominal pendapatan tersebut nantinya akan dibagi kepada anggota kelompok yang berjumlah 10 orang setiap kelompoknya. Namun, kondisi di lapangan ditemukan fakta bahwa penghasilan tersebut pada akhirnya menjadi milik anggota-anggota yang aktif dalam mengelola bantuan. Beberapa kelompok masyarakat belum memiliki data terkait pendapatan sebelum dan setelah mendapatkan manfaat program dikarenakan adanya keterbatasan kelompok penerima dalam melakukan pencatatan. Sebelum menerima program, sebagian besar kelompok memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah, bahkan berada pada kisaran ratusan ribu hingga 1,3 juta rupiah. Setelah program berjalan, seluruh kelompok mengalami peningkatan pendapatan dengan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi awal. Kelompok Sumber

Berkah dan Torjun Sejahtera di sektor perikanan, menunjukkan peningkatan pendapatan yang mencerminkan bagaimana adanya dukungan program terhadap aktivitas ekonomi produktif. Selain itu, kelompok ini menjadi kelompok di sektor pertanian yang paling *sustainable* berdasarkan laporan Fasilitator.

Mekanisme pelaksanaan program Peti Koin Bermantra Sendiri melibatkan beberapa tahap yang dimulai dari penetapan lokasi yang diutamakan merupakan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Setelah penentuan lokasi ini, dilanjutkan dengan target penerima manfaat seperti masyarakat miskin produktif yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk membentuk kelompok masyarakat di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, perindustrian, dan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil, perkebunan sehingga bantuan sesuai dan dapat digunakan secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Muchlis selaku Penanggungjawab Program Peti Koin Bermantra di Bappeda Kabupaten Sampang:

“Setelah Pemerintah Provinsi memilih Kota/Kabupaten penerima program ini, Bappeda Kabupaten Sampang akan mengelompokkan masyarakat yang merupakan masyarakat miskin ke dalam beberapa sektor yang nantinya akan ditinjau kembali mana sektor yang dapat diberikan bantuan dan juga pendampingan. Pendamping program inipun juga sudah diseleksi secara ketat oleh Bappeda Kabupaten Sampang dan juga Bappeda Provinsi Jawa Timur agar dapat memberikan pendampingan maksimal dan mengirim laporan ke pusat setiap bulan.” (*Hasil wawancara pra penelitian, 22 September 2025*).

Bantuan tersebut disalurkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pendampingan pelatihan dan pembinaan yang berfokus pada peningkatan nilai dengan membina hubungan komersial antar pelaku usaha, organisasi masyarakat, fasilitator, pendamping kelompok masyarakat dan mitra lokal yang

merupakan pemain utama yang terlibat (Prasetyo et al., 2024). Penerapan Program Peti Koin Bermantra di Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang positif yaitu peningkatan pendapatan kelompok masyarakat penerima bantuan. Bahkan menurut pernyataan Bapak Muchlis selaku penanggungjawab Program Peti Koin Bermantra di Bappeda Kabupaten Sampang, menjelaskan bahwa pendapatan kelompok masyarakat penerima manfaat dikatakan meningkat daripada saat sebelum menerima bantuan, namun data mengatakan bahwa Kabupaten Sampang tetap menjadi Kabupaten dengan jumlah kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Namun, pada fakta di lapangan adanya program tersebut belum mampu untuk menurunkan angka kemiskinan meskipun telah diberikan pendampingan pada setiap sektornya. Berdasarkan laporan fasilitator Program Peti Koin Bermantra di Kabupaten Sampang, permasalahan tersebut disebabkan oleh jumlah kelompok penerima bantuan yang masih terbatas setiap tahunnya, dimana tidak dapat sekaligus mencakup seluruh kelompok miskin di Kabupaten Sampang. Dimana melihat jauh ke belakang, tujuan program Peti Koin Bermantra dibuat yaitu sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini juga didasarkan pada penelitian terdahulu yang membahas program yang sama yaitu Program Peti Koin Bermantra. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah & Syalsadila (2025) berjudul “Efektivitas Program Peti Koin Bermantra dalam Meningkatkan Pendapatan Kepala Keluarga di Desa Wonorejo” yang membahas terkait efektivitas Program Peti Koin Bermantra dimana ditemukan fakta bahwa masih kurangnya pemahaman anggota kelompok terhadap manajemen keuangan yang optimal sehingga menyebabkan

dana tidak dimanfaatkan secara efisien atau kurang produktif untuk keberlanjutan bantuan dari program tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Salsabila & Imanuari (2025) berjudul “*Community Empowerment Through The Mantra Coin Chest Program at The East Java Province Maritime and Fisheries Service (Cultivated Fisheries Sector)*” yang membahas terkait pemberdayaan masyarakat melalui Program Peti Koin Bermantra di sektor perikanan budidaya. Dimana masih ditemukan bahwa usia anggota kelompok yang relatif tua dan minimnya regenerasi tenaga muda, rendahnya pemahaman teknis budidaya dan pemasaran digital, serta keterbatasan lahan budidaya.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada topik penelitian yang digunakan yaitu tentang Program Peti Koin Bermantra. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian ini didasari oleh data tingginya persentase angka kemiskinan di kabupaten Sampang yang menunjukkan belum optimalnya program pengentasan kemiskinan yaitu Program Peti Koin Bermantra yang secara spesifik disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum memumpuni, dan pengelolaan keuangan yang belum maksimal padahal adanya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat setelah mendapatkan Program Peti Koin Bermantra ini namun angka kemiskinan masih tetap tinggi, sehingga dibutuhkan evaluasi lebih lanjut. Sampai saat ini, masih belum ada pembahasan terkait evaluasi program peti koin bermantra di Kabupaten Sampang. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengisi kesenjangan teoritis.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dibutuhkan monitoring dan evaluasi dari penerapan program tersebut apakah telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Evaluasi yang digunakan adalah Evaluasi Program oleh Stufflebeam (2017), dikutip dari bukunya yang berjudul “*The CIPP Evaluation Model*” meliputi: (1) *Context*, (2) *Input*, (3) *Process*, (4) *Product*. Evaluasi program secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program nantinya digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya, sehingga dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjamin keberlanjutan positif program tersebut kedepannya. Salah satu permasalahan pada penelitian ini yaitu Program Peti Koin Bermantra yang belum dapat menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Sampang meskipun ada hasil positif pada peningkatan pendapatan masyarakat. Apabila dianalisis pada salah satu model evaluasi program CIPP yaitu pada evaluasi *product*, evaluasi ini dilakukan dengan mengukur perubahan, manfaat, dan dampak yang dihasilkan. Proses ini menilai sejauh mana program berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga keputusan ke depannya, sehingga perlu dievaluasi apakah capaian yang ada sudah sejalan dengan tujuan yang diusung program. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut dengan menetapkan judul penelitian yaitu **“Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sampang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada latar belakang maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) sebagai upaya Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang Dikaji melalui Evaluasi CIPP ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk melihat Bagaimana program ini dilaksanakan dengan mengevaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang menggunakan pendekatan Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik peneliti maupun kalangan akademis atau masyarakat umum tentang Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sampang.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN

“Veteran” Jawa Timur. Selain itu, memberikan pengalaman dan wawasan langsung dalam melakukan penelitian khususnya pada kemiskinan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Kabupaten Sampang.

2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik UPN “Veteran” Jawa Timur Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur bacaan untuk perluasan wawasan dalam kajian penelitian kedepannya.

3. Bagi Bappeda Kabupaten Sampang

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program serta memberikan masukan untuk pengembangan program pengentasan kemiskinan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara akademis penelitian ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu atau S1 pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik yang berguna bagi penelitian serupa di masa mendatang.